

**Judul** : Percepat Pengesahan RUU TPKS  
**Tanggal** : Rabu, 05 Januari 2022  
**Surat Kabar** : Media Indonesia  
**Halaman** : 1

# Percepat Pengesahan RUU TPKS

*Perlindungan terhadap korban juga perlu menjadi perhatian dan itu semua membutuhkan peraturan perundangan sebagai landasan hukumnya.*

**ANDHIKA PRASETYO**  
[andhika@mediaindonesia.com](mailto:andhika@mediaindonesia.com)

**P**RESIDEN Joko Widodo telah memerintahkan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga berkoordinasi dan berkonsultasi dengan DPR RI guna mengakselerasi pembahasan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

Kepala Negara menekankan harus ada percepatan mengingat makin banyak kasus kekerasan seksual yang harus ditangani serius. Perlindungan terhadap korban juga perlu menjadi perhatian dan itu semua membutuhkan peraturan perundangan sebagai landasan hukum. "Saya berharap RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual dapat segera disahkan sehingga memberi perlindungan maksimal bagi korban kekerasan seksual," ujar Jokowi di Istana Merdeka, Ja-

karta, kemarin.

Gugus Tugas Pemerintah yang menangani RUU tersebut juga diminta segera menyiapkan daftar inventarisasi masalah. Dengan demikian, proses pembahasan bersama antara pemerintah dan DPR berjalan lebih cepat. "Jadi, nanti langsung masuk ke pokok-pokok substansi untuk memberi kepastian hukum serta menjamin perlindungan kepada korban kekerasan seksual," tegas Presiden.

Dalam kesempatan terpisah, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pimpinan DPR memiliki pertimbangan dalam menentukan alat kelengkapan dewan (AKD) yang akan melakukan pembahasan tingkat I RUU TPKS, di antaranya kelancaran pembahasan. "Pada prinsipnya, kita menginginkan RUU itu juga cepat selesai," kata Dasco.

Pertimbangan lain ialah pendapat fraksi di DPR. Menurut dia, pimpinan bakal mendengarkan

masukannya fraksi-fraksi di DPR terkait penentuan AKD yang akan membahas RUU TPKS. "Pimpinan DPR melaksanakan putusan, Bamus mengkomodasi pendapat fraksi-fraksi, apakah itu kemudian diselesaikan di pansus atau kemudian di Baleg," ungkap Dasco.

Dia menyampaikan Fraksi Gerindra belum membahas AKD yang akan membahas RUU TPKS. Pasalnya, DPR tengah reses. "Biasanya nanti ada rapat fraksi setelah pembukaan masa sidang dan kita akan bicara segala hal,"

sebut Dasco.

Baleg sebelumnya telah menyelesaikan penyusunan draf RUU TPKS. Bakal beleid tersebut diproyeksikan disahkan sebagai usul inisiatif DPR dalam rapat paripurna pembukaan Masa Sidang III pada pertengahan Januari 2022.

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mendesak pimpinan DPR RI segera memaripurnakan RUU TPKS pada pembukaan masa sidang tahun 2022 agar disepakati sebagai RUU usulan DPR. "Pemerintah sudah berkomit-

men mempercepat realisasi UU TPKS, tinggal pimpinan DPR meresponsnya dengan langkah nyata membawa RUU TPKS ke sidang Paripurna," kata Lestari yang juga anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu.

## Fokus korban

Komisi Nasional Perlindungan Perempuan mengapresiasi pernyataan publik Presiden Jokowi mengenai dukungan pembahasan dan pengesahan RUU TPKS. "Pernyataan Presiden sudah ditunggu-tunggu mengingat penundaan pembahasan di tengah kondisi darurat kekerasan seksual yang kita hadapi," ujar Ketua Komnas Perempuan Andy Yentriyani.

Dengan adanya pernyataan Presiden, Komnas Perempuan berharap seluruh partai di Indonesia segera mendukung pengesahan UU tersebut. "Dalam pembahasan nanti betul-betul pemerintah dan DPR RI berfokus pada kepentingan korban sehingga naskah yang dihasilkan bukan hasil negosiasi politik yang justru melemahkan posisi korban dan tidak komprehensif dalam menyikapi kondisi darurat kekerasan seksual saat ini," pungkas Andy. (Far/MGN/ROX-11)

## Urgensi Pengesahan RUU TPKS

- Perlunya aturan hukum yang jelas mengenai kekerasan seksual.
- Maraknya kasus kekerasan seksual di Indonesia.

## Instruksi Presiden Jokowi dalam Percepatan RUU TPKS

- Meminta Menteri Hukum dan HAM dan PPPA berkoordinasi dengan DPR untuk mempercepat pembahasan RUU TPKS.
- Mengingatkan pentingnya percepatan RUU TPKS karena meningkatnya kasus kekerasan seksual di Indonesia.
- Perlunya aturan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual melalui undang-undang.
- Meminta RUU TPKS segera disahkan sehingga memberikan perlindungan secara maksimal bagi korban kekerasan seksual.
- Langsung melakukan pembahasan pada pokok-pokok substansi untuk memberikan kepastian hukum serta menjamin perlindungan pada korban kekerasan seksual.

Sumber: Suineng/DPR/Litbang MI

## Pihak-Pihak yang Terlibat dalam Pembahasan RUU TPKS

- Kementerian Hukum dan HAM
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA)
- DPR

## Permasalahan Lambatnya Pengesahan RUU TPKS

- Belum adanya keputusan Alat Kelengkapan Dewan untuk RUU TPKS.
- Pembahasan RUU TPKS masih berada di Tingkat I.
- DPR sedang dalam masa reses.
- Masih adanya perdebatan dalam beberapa poin yang terdapat di RUU TPKS.